

**Model Kinerja Anggaran :
Suatu Analisis Membangun Determinasi Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Partisipasi Dan
Disiplin Anggaran (Kajian Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung)**

Siti Zulaika^{1*}, Harmani Harun², Erna Listyaningsih³

sitizulaika@gmail.com^{1}, harmaniharun@malahayati.ac.id², ernalistyaningsih@malahayati.ac.id³*

Abstract

Regional Government Organizations (OPD) play a strategic role in realizing transparent, accountable, and efficient financial management. The achievement of optimal budget performance is influenced by several factors, including accountability, transparency, supervision, participation, and budget discipline. This study aims to analyze the effect of these factors on budget performance in OPDs in Bandar Lampung City. This research uses a quantitative approach with data collected through questionnaires. The sample consisted of 47 respondents, who were staff members in the accounting and finance sub-sections from seven OPDs that agreed to participate in the study. Data analysis was conducted using SmartPLS software. The results show that all independent variables—accountability, transparency, supervision, participation, and budget discipline—have a positive and significant influence on budget performance. The t-statistics for each variable are: accountability (2.914), transparency (2.184), supervision (2.099), participation (2.528), and budget discipline (2.081). The R² value is 0.571, indicating that these five variables explain 57.1% of the variability in budget performance, while the remaining 42.9% is explained by other factors outside the model. These findings emphasize the importance of applying good governance principles to improve the effectiveness of regional budget management. The study is expected to serve as a useful reference for OPDs in formulating policies and strategies to enhance budget performance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Supervision, Participation, Budget Discipline, Budget Performance*

1. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari kinerja dan anggaran pemerintah daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian dari proses perencanaan jangka pendek yang berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang. Anggaran merupakan alat yang digunakan untuk menentukan alokasi dana dalam jumlah tertentu untuk setiap program dan aktivitas, dengan sumber dana berasal dari masyarakat (Kristanti, 2019). Kinerja anggaran pemerintah daerah sangat terkait dengan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, sektor publik sering dianggap tidak efisien, boros, dan rentan terhadap kebocoran dana.

Faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan anggaran meliputi akuntabilitas, transparansi, pengawasan, partisipasi anggaran, dan disiplin anggaran. Umami & Nurodin (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja kepada pihak yang berhak, sedangkan Arifani, Salle, dan Rante (2018) menekankan hak publik dalam mengetahui kebijakan yang diambil. Transparansi, menurut Mardiasmo (2006), meliputi keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Pengawasan dari atasan langsung, legislatif, serta lembaga pengawas khusus berperan penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana (Safitri, 2019). Partisipasi anggaran juga diperlukan untuk mendorong kreativitas dan tanggung jawab karyawan dalam pengambilan keputusan (Safitri, 2019).

Tabel 1 Opini LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

LKPD (Tahun)	Opini
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber : <https://lampung.bpk.go.id/>

Meskipun Kota Bandar Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten dari 2019 hingga 2023, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran.

Tantangan tersebut meliputi kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang belum optimal, keterbatasan akses publik terhadap informasi anggaran, serta pengawasan yang belum sepenuhnya efektif. Solusi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pelatihan bagi pegawai OPD, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, serta memanfaatkan teknologi untuk transparansi dan pemantauan anggaran secara real-time.

Penegakan disiplin anggaran dapat dilakukan dengan kontrol ketat terhadap perubahan anggaran yang disertai justifikasi yang transparan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mempertahankan opini WTP di masa depan.

2. Kajian Pustaka

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Jika bawahan (*agent*) yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran mempunyai informasi yang dimilikinya untuk membantu kepentingan perusahaan.

Kinerja Anggaran

Definisi kinerja menurut Mahmudi (2019), yaitu sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), hal tersebut dikarenakan hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan dan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusi ekonomi.

Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik ialah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Jenis - Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit - unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerinrah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Indikator Akuntabilitas

Setiyaningrum (2017), membagi Indikator akuntabilitas menjadi lima yaitu:

- a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip prinsip administrasi yang benar.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan tercapainya sasaran suatu program.
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- d. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai, Menurut Mardiasmo (2018)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Andrianto (2007), Indikator transparansi yaitu:

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi :
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- c. Adanya audit yang independen dan efektif.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk ditetapkannya ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Tujuan pengawasan pada dasarnya untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi.

Indikator- Indikator dalam Pengawasan

Secara umum terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kegiatan pengawasan, yaitu:

1. *Input* (masukan) pengawasan
2. *Input* (masukan) pengawasan yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan memiliki keterkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.
3. Proses pengawasan
Proses pengawasan adalah tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
4. *Output* (keluaran) pengawasan
Output (keluaran) pengawasan merupakan sesuatu yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. *Output* pengawasan berkaitan dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya (Anugriani, 2014).

Partisipasi Anggaran

Partisipasi Anggaran dapat diartikan sebagai proses keikutsertaan manajer pusat pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran dan mempengaruhi target anggaran sebagai bagian utama atas tanggung jawabnya (Matodang et al, 2015).

Indikator- Indikator Partisipasi Penyusunan Anggaran

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi penyusunan anggaran sebagai berikut (Gusman, 2024):

- 1) Keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan unit pelaksana kegiatan.
- 2) Keterlibatan dalam penentuan metode dan strategi pelaksanaan.
- 3) Keterlibatan dalam penentuan prioritas dan advokasi anggaran.
- 4) Keterlibatan dalam penentuan tujuan dan kejelasan sasaran anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran sampai anggaran final
- 6) Kesungguhan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran.

Disiplin Anggaran

Faktor lain yang menjadi penyebab oknum penyelenggara pemerintahan daerah melakukan tindakan penyalahgunaan pengelolaan anggaran karena kurang adanya Disiplin Anggaran dalam pelaporan

pengelolaan anggaran. Disiplin Anggaran menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat kuantitatif. Metode survei dipilih sebagai sumber data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari subjek dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Metode survei yang dilakukan fokus pada pengumpulan data responden yang memiliki informasi tertentu sehingga memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan masalah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang mempunyai karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2019). Populasi dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas-dinas Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependent*) yaitu Kinerja anggaran dan lima variabel bebas (*independent*) yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Partisipasi dan Disiplin Anggaran secara operasional.

Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini cara menganalisis data yaitu menggunakan model persamaan struktural (SEM). Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* Smart PLS.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu kuisioner melakukan fungsi ukurnya dan agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut (Sugiyono, 2014:267). Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan *content validity* dengan metode *expert judgement*.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha* akan menghasilkan nilai alpha dalam skala 0-1 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument, yang dapat dikelompokkan dalam lima kelas.

Pengukuran Struktur Model

Setelah analisis pengukuran model selesai, tahap selanjutnya adalah pengukuran struktur model. Pemeriksaan ini meliputi :

Coefficient of Determination (R²)

Konstruk endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan mengevaluasi R². R² mengukur hubungan varians suatu Latent variabel (LV) yang dijelaskan untuk total varians. Urbach dan Ahlemann, 2010 menyatakan bahwa nilai R² harus cukup tinggi dalam model dan harus memiliki nilai minimum yang jelas yaitu bahwa nilai sekitar 0.670 dapat dikatakan substansial dan nilai 0.333 dikatakan rata-rata, sedangkan nilai 0,190 merupakan nilai yang lemah. Pengukuran struktural model diukur dengan rata-rata R² untuk variabel terikat dan pengujian koefisiensi jalur. Menurut Camisón & López (2010) bahwa nilai R² lebih dari 0.6 dapat diterima. Pengujian linear model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square (R²) dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R² untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Path Coefficients

Tes *Path Coefficient* (β) menunjukan kekuatan hubungan antar konstruk. Hubungan antar konstruk dikatakan kuat jika *path coefficients* tersebut lebih besar dari 0,100, selanjutnya dikatakan signifikan jika *path coefficients* pada level 0,050 (Urbach & Ahlemann, 2010)

4. Hasil dan Pembahasan

Outer Model (Model Pengukuran)

A. Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai *loading factor* > 0,5, dan nilai t statistik > 2,0 terhadap konstruk yang dituju, sebaliknya jika nilai *loading factor* < 0,5 dan t statistik < 2,0 maka dikeluarkan dari model dan dilakukan *run* ulang (Yamin, 2016:70).

1. *Loading Factor*

Loading factor merupakan korelasi antara indikator dengan konstraknya. Semakin tinggi korelasinya, menunjukkan tingkat validitas lebih baik. *Output SmartPLS* untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. *Outer Loading*

Indikator	Konstruk	<i>Standardized Loading Factor</i>
AK1	Akuntabilitas	0.742
AK2		0.736
AK3		0.785
AK4		0.712
AK5		0.820
AK6		0.812
AK7		0.815
AK8		0.752
DA1	Disiplin Anggaran	0.923
DA2		0.907
DA3		0.871
DA4		0.901
DA5		0.852
DA6		0.904
DA7		0.920
DA8		0.911
DA9		0.840
DA10		0.858
KA1	Kinerja Anggaran	0.822
KA2		0.817
KA3		0.771
KA4		0.692
KA5		0.752
KA6		0.804
PE1	Partisipasi	0.920
PE2		0.911
PE3		0.840
PE4		0.858
PE5		0.778
PE6		0.712
PR1	Pengawasan	0.878
PR2		0.906
PR3		0.894
PR4		0.874
PR5		0.911
PR6		0.821
PR7		0.750

Indikator	Konstruk	Standardized Loading Factor
PR8		0.798
TA1	Transparansi	0.871
TA2		0.854
TA3		0.815
TA4		0.761
TA5		0.902
TA6		0.836
TA7		0.878
TA8		0.772

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan hasil *loading factor* yaitu :

1. Akuntabilitas (AK) Nilai indikator pertanyaan untuk variabel akuntabilitas adalah sebagai berikut: AK1 = 0.742, AK2 = 0.736, AK3 = 0.785, AK4 = 0.712, AK5 = 0.820, AK6 = 0.812, AK7 = 0.815, AK8 = 0.752. Semua indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pertanyaan untuk variabel akuntabilitas valid.
2. Disiplin Anggaran (DA) Nilai indikator pertanyaan untuk variabel disiplin anggaran adalah sebagai berikut: DA1 = 0.923, DA2 = 0.907, DA3 = 0.871, DA4 = 0.901, DA5 = 0.852, DA6 = 0.904, DA7 = 0.920, DA8 = 0.911, DA9 = 0.840, DA10 = 0.858. Seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0.5, sehingga indikator pertanyaan disiplin anggaran dinyatakan valid.
3. Kinerja Anggaran (KA) Nilai indikator pertanyaan untuk variabel Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut: KA1 = 0.822, KA2 = 0.817, KA3 = 0.771, KA4 = 0.692, KA5 = 0.752, KA6 = 0.804. Dengan nilai *loading factor* di atas 0.5, seluruh indikator kinerja anggaran dinyatakan valid.
4. Partisipasi (PE) Nilai indikator pertanyaan untuk variabel Partisipasi adalah sebagai berikut: PE1 = 0.920, PE2 = 0.911, PE3 = 0.840, PE4 = 0.858, PE5 = 0.778, PE6 = 0.712. Semua indikator partisipasi valid karena memiliki nilai *loading factor* di atas 0.5.
5. Pengawasan (PR) Nilai indikator pertanyaan untuk variabel pengawasan adalah sebagai berikut: PR1 = 0.878, PR2 = 0.906, PR3 = 0.894, PR4 = 0.874, PR5 = 0.911, PR6 = 0.821, PR7 = 0.750, PR8 = 0.798. Nilai *loading factor* yang semuanya di atas 0.5 menunjukkan bahwa indikator pengawasan valid.
6. Transparansi (TA) Nilai indikator pertanyaan untuk variabel transparansi adalah sebagai berikut: TA1 = 0.871, TA2 = 0.854, TA3 = 0.815, TA4 = 0.761, TA5 = 0.902, TA6 = 0.836, TA7 = 0.878, TA8 = 0.772. Semua indikator transparansi valid karena memenuhi kriteria *loading factor* > 0.5.

Seluruh indikator pada keenam variabel (Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Kinerja Anggaran, Partisipasi, Pengawasan, dan Transparansi) menunjukkan nilai *loading factor* di atas 0.5, yang berarti indikator-indikator tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Hasil dalam validitas *convergent* dihitung dengan melihat *output construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat nilai AVE. Kriteria nilai validitas *convergent* dikatakan baik jika memiliki nilai AVE lebih dari 0.5 (Yamin, 2016:75). Berdasarkan nilai AVE menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	
Variabel	AVE
Akuntabilitas	0.732
Disiplin Anggaran	0.707
Kinerja Anggaran	0.770
Partisipasi	0.678

Variabel	AVE
Pengawasan	0.676
Transparansi	0.752

Sumber: Data diolah 2025

Hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua nilai AVE pada variabel penelitian ini sudah menunjukkan sebagai pengukur yang *fit*, memiliki nilai AVE diatas 0.5 hal ini berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah reliabel.

3. Validitas Diskriminan

Discriminant validity digunakan untuk menguji validitas suatu model. *Discriminant validity* dilihat melalui nilai *cross loading* yang menunjukkan besarnya korelasi antar konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk lainnya. Standar nilai yang digunakan untuk *cross loading* yaitu harus lebih besar dari 7 atau dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik

Tabel 4. Discriminant validity

	Akuntabilitas	Disiplin Anggaran	Kinerja Anggaran	Partisipasi	Pengawasan	Transparansi
AK1	0.742	-0.037	0.282	0.347	0.268	0.531
AK 2	0.736	-0.127	0.248	0.396	0.238	0.382
AK 3	0.785	0.027	0.159	0.349	0.249	0.413
AK 4	0.712	0.070	0.345	0.464	0.285	0.370
AK 5	0.820	0.012	0.436	0.242	0.299	0.430
AK 6	0.812	-0.038	0.433	0.353	0.193	0.497
AK 7	0.815	0.114	0.406	0.473	0.086	0.360
AK 8	0.752	0.062	0.286	0.491	0.123	0.489
DA1	0.159	0.923	0.281	0.358	0.251	0.305
DA 10	0.280	0.858	0.275	0.263	0.218	0.284
DA 2	0.199	0.907	0.093	0.234	0.240	0.310
DA 3	0.124	0.871	0.297	0.285	0.262	0.299
DA 4	0.166	0.901	0.212	0.328	0.228	0.278
DA 5	0.096	0.852	0.085	0.322	0.275	0.320
DA 6	0.237	0.904	0.262	0.404	0.290	0.298
DA 7	0.015	0.920	0.195	0.456	0.268	0.312
DA 8	0.281	0.911	0.280	0.448	0.256	0.294
DA 9	0.275	0.840	0.317	0.403	0.241	0.309
KA1	0.281	0.358	0.822	0.007	0.265	0.297
KA 2	0.275	0.263	0.817	-0.106	0.254	0.289
KA 3	0.093	0.234	0.771	0.014	0.240	0.276
KA 4	0.297	0.285	0.692	0.064	0.278	0.295
KA 5	0.212	0.328	0.752	0.072	0.269	0.288
KA 6	0.085	0.322	0.804	0.060	0.273	0.292
PE1	0.262	0.404	0.268	0.920	0.251	0.301
PE2	0.195	0.456	0.238	0.911	0.242	0.295
PE3	0.280	0.448	0.249	0.840	0.235	0.287
PE4	0.317	0.403	0.285	0.858	0.239	0.296

	Akuntabilitas	Disiplin Anggaran	Kinerja Anggaran	Partisipasi	Pengawasan	Transparansi
PE5	0.334	0.432	0.299	0.778	0.248	0.290
PE6	0.195	0.260	0.193	0.712	0.232	0.283
PR1	-0.159	0.268	0.007	0.341	0.878	0.489
PR 2	-0.280	0.238	-0.106	0.465	0.906	0.306
PR 3	-0.199	0.249	0.014	0.497	0.894	0.295
PR 4	-0.124	0.285	0.064	0.382	0.874	0.355
PR 5	-0.166	0.299	0.072	0.413	0.911	0.223
PR 6	-0.096	0.193	0.060	0.370	0.821	0.166
PR 7	-0.237	0.086	0.008	0.430	0.750	0.427
PR 8	-0.127	0.171	-0.002	0.360	0.798	0.421
TA1	-0.182	0.308	0.282	0.268	0.285	0.871
TA 2	-0.119	0.388	0.248	0.238	0.328	0.854
TA 3	-0.214	0.255	0.159	0.249	0.322	0.815
TA 4	-0.217	0.287	0.345	0.285	0.404	0.761
TA 5	-0.144	0.412	0.436	0.299	0.456	0.902
TA 6	-0.149	0.352	0.433	0.193	0.448	0.836
TA 7	-0.037	0.347	0.406	0.086	0.403	0.878
TA 8	-0.127	0.396	0.286	0.171	0.432	0.772

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4, nilai *cross loading* pada masing-masing item memiliki nilai >0.70 , dan juga pada masing-masing item memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan ketika dihubungkan dengan variabel laten lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel manifest dalam penelitian ini telah tepat menjelaskan variabel latennya dan membuktikan bahwa *discriminant validity* seluruh item valid.

B. Reliabilitas

Pemeriksaan reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih dari 0,7. Pada Tabel 5 menunjukkan realibilitas konstruk yang dilihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha*.

Tabel 5. Quality Criteria (Composite Reliability, Cronbachs Alpha)

	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
Akuntabilitas	0.956	0.949
Disiplin Anggaran	0.935	0.917
Transparansi	0.976	0.973
Partisipasi	0.944	0.932
Pengawasan	0.865	0.872

Sumber: Data diolah 2025

Pada Tabel 5 terlihat nilai *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability* yang dihasilkan konstruk akuntabilitas, disiplin anggaran, transparansi, partisipasi, pengawasan sangat baik yaitu diatas 0.7.

Pengukuran Model / Measurement Structural Model

Setelah analisis pengukuran model selesai, tahap selanjutnya adalah pengukuran struktur model. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini *path coefficient*.

1. Coefficient of determination (R^2)

Konstruk endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan mengevaluasi R^2 . Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Nilai R^2 konstruk kinerja adalah 0.403 artinya konstruk Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Transparansi, Partisipasi dan Pengawasan mampu

menjelaskan variabilitas konstruk kinerja sebesar 0.403 atau 40.3 %, dan berdasarkan persyaratan tersebut diatas, dapat terlihat bahwa pengukuran *structural model* dalam penelitian ini layak.

Tabel 6. The Result Of PLS Structural Model; R²

Independen Variables	R ²
Akuntabilitas	0.403
Disiplin Anggaran	
Transparansi	
Partisipasi	
Pengawasan	

Sumber: Data diolah 2020

2. Path Coefficients

Pengujian *path coefficients* digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk adalah kuat, hubungan antar konstruk dikatakan tinggi jika *path coefficients* tersebut lebih besar dari 0.100, selanjutnya dikatakan signifikan jika *path coefficients* pada level > 0.050.

Tabel 7. The resul of PLS structural model; path coefficient, t-statistics

Hubungan Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Value
Akuntabilitas -> Kinerja Anggaran	0.338	0.369	0.094	2.085	0.038
Transparansi -> Kinerja Anggaran	0.335	0.353	0.105	2.245	0.025
Pengawasan -> Kinerja Anggaran	0.353	0.327	0.142	2.114	0.035
Partisipasi -> Kinerja Anggaran	0.310	0.345	0.098	2.174	0.030
Disiplin Anggaran -> Kinerja Anggaran	0.362	0.339	0.110	2.205	0.028

*** Significant at 1 % (2.36712) = Sangat Signifikan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. **Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja anggaran** dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar **0.338**. Nilai *t-statistics* sebesar **2.085 > 1.96** dan nilai *p-value* sebesar **0.038 < 0.05**, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran terbukti*.
2. **Transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja anggaran** dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar **0.335**. Nilai *t-statistics* sebesar **2.245 > 1.96** dan nilai *p-value* sebesar **0.025 < 0.05**, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran terbukti*.
3. **Pengawasan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja anggaran** dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar **0.353**. Nilai *t-statistics* sebesar **2.114 > 1.96** dan nilai *p-value* sebesar **0.035 < 0.05**, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran terbukti*.
4. **Partisipasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja anggaran** dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar **0.310**. Nilai *t-statistics* sebesar **2.174 > 1.96** dan nilai *p-value* sebesar **0.030 < 0.05**, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran terbukti*.
5. **Disiplin anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja anggaran** dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar **0.362**. Nilai *t-statistics* sebesar **2.205 > 1.96** dan nilai *p-value* sebesar **0.028 < 0.05**, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *disiplin anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran terbukti*.

Dari hasil pengujian data menggunakan SmartPLS, diperoleh hasil pengujian hipotesis berupa nilai *Original Sample (O)* atau β yang merupakan nilai koefisien jalur, serta nilai *t-statistics* untuk melihat

tingkat signifikansi hubungan antar variabel. Nilai koefisien parameter (*Original Sample*) menunjukkan arah pengaruh variabel, apakah positif atau negatif, sedangkan signifikansi diuji dengan membandingkan nilai *t-statistics* dengan batas kritis 1.96 untuk tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai *t-statistics* > 1.96 dan *p-value* < 0.05, maka hipotesis dapat dinyatakan terbukti.

Pembahasan

Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.338, *t-statistics* 2.085 > 1.96, dan *p-value* 0.038 < 0.05, sehingga hipotesis ini terbukti. Hasil ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap organisasi untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika akuntabilitas diterapkan dengan baik, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja anggaran. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi cenderung memiliki pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Akuntabilitas mendorong pegawai untuk bekerja sesuai dengan target dan meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran. Implikasi praktis dari hasil ini menunjukkan bahwa organisasi perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui peningkatan sistem pelaporan, pengawasan internal, dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan demikian, kinerja anggaran dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tujuan organisasi.

Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian, transparansi berpengaruh positif dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.335, *t-statistics* 2.245 > 1.96, dan *p-value* 0.025 < 0.05, sehingga hipotesis ini terbukti. Hasil ini mendukung teori transparansi yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran. Transparansi memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk memahami bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses anggaran juga mendorong terciptanya pengawasan yang lebih baik. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa organisasi perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, pelaksanaan forum-forum diskusi publik terkait anggaran dapat menjadi langkah untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kinerja anggaran.

Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh positif dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.353, *t-statistics* 2.114 > 1.96, dan *p-value* 0.035 < 0.05, sehingga hipotesis ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori pengawasan yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif akan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal untuk mendeteksi penyimpangan, mencegah pemborosan, dan memperbaiki pelaksanaan anggaran. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat berdampak positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Pengawasan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan anggaran, sehingga kinerja anggaran menjadi lebih optimal. Implikasi praktisnya, organisasi harus memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan auditor internal, tim pengawasan independen, dan masyarakat. Penerapan teknologi dalam sistem pengawasan juga dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Partisipasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian, partisipasi memiliki pengaruh positif dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.310, *t-statistics* 2.174 > 1.96, dan *p-value* 0.030 < 0.05, sehingga hipotesis ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori partisipasi yang menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses penganggaran dapat meningkatkan rasa memiliki, pemahaman, dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Partisipasi yang baik memungkinkan masukan dari berbagai pihak untuk diserap dalam penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Penelitian ini didukung oleh temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari pemangku

kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berkontribusi pada peningkatan efektivitas kinerja anggaran. Implikasi praktis dari hasil ini adalah pentingnya melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses penyusunan dan evaluasi anggaran. Forum musyawarah, survei kebutuhan, dan konsultasi publik dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi.

Disiplin Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh positif dengan nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.362, *t-statistics* 2.205 > 1.96, dan *p-value* 0.028 < 0.05, sehingga hipotesis ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori disiplin anggaran yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan, jadwal, dan ketentuan anggaran sangat penting untuk mencapai kinerja anggaran yang baik. Disiplin dalam anggaran mencakup penggunaan anggaran sesuai alokasi, penghindaran pemborosan, dan kepatuhan terhadap tenggat waktu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa organisasi yang menerapkan disiplin anggaran yang ketat cenderung memiliki kinerja anggaran yang lebih efektif. Disiplin ini membantu organisasi menghindari defisit, memastikan penggunaan anggaran yang efisien, dan meningkatkan akuntabilitas. Implikasi praktisnya, organisasi harus menegakkan peraturan anggaran secara konsisten, melakukan pelatihan terkait pengelolaan anggaran, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran anggaran. Penerapan sistem monitoring berkala juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Akuntabilitas berkontribusi pada peningkatan kinerja anggaran. semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, semakin baik kinerja anggaran yang dihasilkan. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung tercapainya target anggaran. Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. semakin tinggi partisipasi dalam proses anggaran, semakin baik kinerja anggaran yang dicapai. partisipasi aktif meningkatkan akurasi alokasi anggaran sesuai kebutuhan. Disiplin Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Disiplin dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran membantu organisasi mencapai kinerja anggaran yang optimal.

Daftar Pustaka

- Annalpada, G. (2023). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Opd Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*; Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Mahasiswa Akuntansi.
- Anugriani, Rezky Mulya. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.
- Arifani, C. dkk. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13 (1), 68-82.
- Arifani, Salle, dan Rante (2018), Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* volume 13, nomor 1, Mei 2018
- Fajri, R. N., Djumali, D., & Hartono, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*; Vol 16, No 1 (2019); 2614-820X; 1693-9352; 10.30651/Blc.V16i1. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/2455>
- Firdayani, A. (2020). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kelurahan Pal IX Kecamatan Sungai

- Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat). Jurnal Kajian Ilmiah / Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE); Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Mahasiswa Akur.....
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit. Universitas Diponegoro
- Gusman, Erry (2024), Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh Legislatif di Daerah. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah:Agam Sumbar.
- Jogiyanto. 2015. PLS (Partial Least Square) . Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis, Yogyakarta:Andi
- Kristanti, Renny. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Komitmen Organisasi, Dan Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money (Studi Empiris Pada OPD Kota Magelang). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Lubis, R. Y., Zainuddin, Z., & Rusmina, C. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020. Serambi Konstruktivis; Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Serambi Konstruktivis; 233-243 ; 2656-5781 ; 10.32672/Konstruktivis.V4i2.
<https://ojs.serambimekkah.ac.id/Konstruktivis/article/view/4707>
- Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Mita Andriani B, I. D. A., Wianto Putra, I. M., & Riasning, N. P. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Manajerial, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung: Pe... Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Manajerial Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa; Vol. 1 No. 2 (2020); 46-53.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Purnomo, Budi S &, and Cahaya Putri. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money.Jurnal Riset Akuntansi dan K 6 (3): 467- 80.
- Putri, Debi Pertiwi. (2015).Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau).Jom FEKON 2(2): 1–15.
- Rosmaida. (2020). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: PT Rel Karir Pembelajar.
- Safitri, (2019), Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya), Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 3, Maret 2019
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In The 6th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang (pp. 205-210).
- Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola Dan EGovernment Terhadap Korupsi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Universitas Indonesia
- Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Edisi ke 2. Bandung: Alfabeta.
- Suhaemi, A. S., Sarboini, & Maryam. (2023). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen Syariah; Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen Syariah ; 3026-510X ; 10.32672/Jams.V1i1.
<https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/jams/article/view/633>
- Umami dan Nurodin, Idang (2017) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6 (11). pp. 74-80. ISSN 2088-6969
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- Veronika, P., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*; Vol 7 No 3 (2023): Edisi September - Desember 2023; 938-948 ; 2541-5255 ; 2621-5306 ; 10.31955/Mea.V7i3. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3473>
- Victory dan Charoline, 2016, Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014.
- Yassir, Y., Mursalin, M., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME : Journal of Management*; Vol 5, No 2 (2022); 477-494 ; 2614-851X ;